

**EVALUASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG MILIK  
DAERAH PADA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA  
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN MUKOMUKO**

**TESIS**



**Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan  
Gelar Magister *Chief Information Officer* (CIO)**

**Oleh:  
BUDI SETIAWAN  
NIM. 1304468**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2015**

## **ABSTRACT**

**Budi Setiawan, 2015. *Evaluation of Management Information Systems Regional Property (SIMDA BMD) On Family Planning Board and Women's Empowerment in Mukomuko Regency.***

*Family Planning Board and Women's Empowerment in Mukomuko Regency have to use information technology to improve service performance, especially in the field of regional assets using the Regional Management Information Systems Regional Property (SIMDA BMD). In the implementation of this SIMDA BMD absence of process monitoring, evaluation and assessment of the performance of during this SIMDA BMD by internal parties, and also there is no structure of positions in the agency in charge of monitoring, supervising and assessing the performance of SIMDA BMD, so the process of monitoring the performance of SIMDA BMD at the Agency Family Planning and Women's Empowerment in Mukomuko Regency not materialize.*

*This study is evaluation that gives an overview of the condition of governance SIMDA BMD in Family Planning Board and the Empowerment of Women (BKKB & PP) in Mukomuko Regency and then analyzed with the process capability model of COBIT 5 to get recommendations for improvement of governance SIMDA BMD at BKKB & PP in Mukomuko Regency. The research data was collected through quantitative data and qualitative data.*

*From the evaluation of the Management Information Systems Regional Property (SIMDA BMD) BKKB & PP Mukomuko can be concluded that the results of the enhanced capabilities MEA01 of monitoring, evaluating, and assessing the performance and suitability of SIMDA BMD can be seen that BKKB & PP Mukomuko in carrying out this process has been pretty good. This is evidenced by the achievement of level 1 process performed on stage largely Achieved (66.66%). While at level 2, level 3, level 4, and level 5 is still not achieved, and this is not optimal basic practices implemented on MEA01 process and the lack of documentation about the process MEA01 done, and less work to achieve measurable results that work product (0%) at the level of 0 not Achieved.*

**Keywords:** *SIMDA BMD, monitoring, evaluation*

## ABSTRAK

**Budi Setiawan, 2015. Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (Simda BMD) Pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko. Tesis Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.**

Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko telah memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja pelayanannya khususnya pada bidang aset daerah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD). Dalam pelaksanaan SIMDA BMD ini tidak adanya proses pengawasan, evaluasi dan penilaian terhadap kinerja SIMDA BMD selama ini oleh pihak internal, dan juga tidak ada struktur jabatan diinstansi yang bertugas memonitor, mengawasi dan menilai kinerja SIMDA BMD, sehingga proses pengawasan kinerja SIMDA BMD di Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko tidak terlaksana.

Penelitian ini adalah penelitian Evaluasi yang memberikan gambaran kondisi tata kelola SIMDA BMD di Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKB&PP) Kabupaten Mukomuko dan kemudian dianalisis dengan kapabilitas proses model Cobit 5 untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan tata kelola SIMDA BMD pada BKKB&PP Kabupaten Mukomuko. Data penelitian ini dikumpulkan melalui data kuantitatif dan data kualitatif.

Dari hasil evaluasi terhadap Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) BKKB&PP Kabupaten Mukomuko dapat disimpulkan bahwa hasil peningkatan kapabilitas MEA01 tentang memantau, evaluasi, dan menilai kinerja serta keselarasan SIMDA BMD dapat diketahui bahwa BKKB&PP Kabupaten Mukomuko dalam melaksanakan proses ini sudah cukup baik. Ini terbukti dengan tercapainya level 1 *performed process* pada tahap *largely achieved* (66,66%). Sedangkan pada level 2, level 3, level 4, dan level 5 masih belum tercapai, hal ini disebabkan belum optimalnya praktek dasar yang dilaksanakan pada proses MEA01 dan belum adanya pendokumentasian tentang proses MEA01 yang dilakukan, dan kurang terukurnya hasil kerja yang dicapai yaitu *work product* (0%) berada pada level 0 *not achieved*.

**Kata Kunci :** SIMDA BMD, pengawasan, evaluasi.

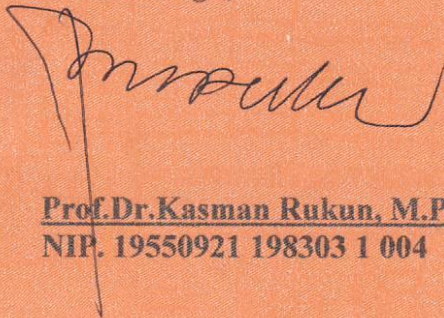
## PERSETUJUAN AKHIR TESIS

---

Mahasiswa : Budi Setiawan  
NIM : 1304468  
Program Studi : Magister (S2) CIO

### MENYETUJUI

Pembimbing I,



Prof. Dr. Kasman Rukun, M.Pd.  
NIP. 19550921 198303 1 004

Pembimbing II,



Dr. Ridwan, M.Sc.Ed.  
NIP. 19520116 197903 1 002

### PENGESAHAN



Drs. Syahril, S.T., MSCE., Ph.D.  
NIP. 19640506 198903 1 002

Ketua Pascasarjana FT,



Prof. Dr. Nizwardi Jalinus, M.Ed.  
NIP. 19520822 197710 1 001

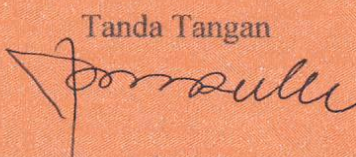



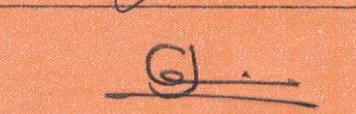
**PERSETUJUAN KOMISI  
UJIAN TESIS**

---

**TESIS**

Nama : Budi Setiawan  
NIM : 1304468

Dipertahankan didepan Panitia Penguji Tesis  
Program Magister *Chief Information Officer*  
Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang  
Tanggal : 10 Februari 2015

No.	Nama	Tanda Tangan
1	<b><u>Prof. Dr. Kasman Rukun, M.Pd.</u></b> (Ketua)	
2	<b><u>Dr. Ridwan, M.Sc.Ed.</u></b> (Sekretaris)	
3	<b><u>Dr. Usmeldi, M.Pd.</u></b> (Anggota)	
4	<b><u>Drs. Denny Kurniadi, M.Kom.</u></b> (Anggota)	
5	<b><u>Drs. Efrizon, M.T.</u></b> (Anggota)	

Padang, 10 Februari 2015  
Program Studi S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan  
Ketua,



**Dr. Fahmi Rizal, M.Pd., M.T.**  
NIP. 19591204 198503 1 004

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul **“Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (Simda BMD) Pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko,”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, Februari 2015

ng menyatakan,



**Budi Setiawan**  
NIM. 1304468

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Karunia dan Ridho Nya peneliti dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (Simda BMD) Pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko.”**

Tesis ini peneliti susun dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Program Pascasarjana Magister Chief Information Officer Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Dalam penyusunan hingga terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Kasman Rukun, M.Pd selaku pembimbing I dan Dr. Ridwan, M.Sc.Ed selaku pembimbing II, yang telah membantu peneliti dalam memberikan arahan dan dukungan, sehingga tesis ini dapat di selesaikan.
2. Dr. Usmeldi, M.Pd, Drs. Denny Kurniadi, M.Kom dan Drs. Efrizon, MT selaku dosen kontributor yang telah memberikan saran dan masukan untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Drs. Syahril, ST, MSCE, Ph.D selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
4. Prof. Dr. Nizwardi Jalinus, M.Ed selaku Ketua Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
5. Dr. Fahmi Rizal, M.Pd, MT selaku Ketua Program Magister S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
6. Muhammad Adri, S.Pd, MT selaku Pengelola Program Magister S2 Chief Information Officer Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
7. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM) sebagai penyandang dana program beasiswa Magister Chief Information Officer.

8. Lukito Edi Nugroho, M.Sc, Ph.D, dan Dr.Dedi Irfan, M.Kom yang telah meluangkan waktu untuk saya dalam memvalidasi instrument.
9. Drs. Nur Alam selaku Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko yang telah memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
10. Jun Harto, SKM selaku Sekretaris, Hetti Kurniati, SKM selaku Kasubbid Umum dan Elva Putriani, S.AP selaku Operator SIMDA BMD, beserta seluruh pegawai Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko yang telah membantu peneliti dalam memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan dalam tesis ini.
11. Teman-teman seperjuangan Program Magister Chief Information Officer FT UNP yang telah memberikan bantuan moril dalam suka dan duka bersama.
12. Tesis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, kakak dan adik, serta seluruh keluarga yang telah mendukung saya. Dan semua pihak yang telah membantu dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Korespondensi dapat ditujukan kepada peneliti lewat [budisetiawan.bkkbn@gmail.com](mailto:budisetiawan.bkkbn@gmail.com).

Akhir kata, semoga tesis ini bisa memberikan manfaat yang baik bagi pemerintahan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang akan datang.

Padang, Februari 2015

Peneliti

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN AKHIR TESIS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN KOMISI UJIAN TESIS</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Batasan Masalah .....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	11
A. Landasan Teori .....	11
B. Kajian Penelitian Yang Relevan .....	39
C. Kerangka Konseptual .....	41
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	42
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Prosedur Penelitian .....	42
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	44
D. Subjek penelitian .....	45

E. Instrumen Penelitian .....	46
F. Teknik Pengumpulan Data .....	47
G. Keabsahan Data.....	47
H. Teknik Analisis Data.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Hasil Penelitian .....	52
1. Pemetaan Tujuan Organisasi ke Enterprise Goal COBIT 5 .....	52
2. Pemetaan Enterprise Goal terpilih ke IT Related Goal .....	52
3. Pemetaan <i>IT Related Goal</i> terpilih ke proses TI yang terkait .....	53
4. Proses Memantau, Evaluasi dan Menilai Kesesuaian Kinerja .....	55
B. Pembahasan.....	59
1. Penentuan Level Proses Saat ini ( <i>as-is</i> ).....	60
2. Pencapaian Kapabilitas Yang Diharapkan .....	61
3. Penyusunan Perbaikan Pada Proses Pengawasan Kinerja SIMDA BMD .....	61
<b>BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Implikasi.....	65
C. Saran.....	66
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Komparasi Cobit 5 Dengan Framework Yang Lain.....	8
2. Tampilan SIMDA BMD v.2.0.0.1 .....	15
3. Laporan Mutasi Barang.....	15
4. Buku Inventaris .....	16
5. Kartu Inventaris Barang (KIB) B .....	16
6. Kartu Inventaris Barang (KIB) C.....	17
7. Kartu Inventaris Ruang (KIR).....	17
8. Rekapitulasi Barang ke Neraca .....	18
9. Prinsip dasar COBIT .....	28
10. <i>Covering enterprise end-to-end</i> .....	29
11. <i>COBIT 5 Enterprise Enabler</i> .....	31
12. Area Tata kelola dan Manajemen dalam COBIT 5 .....	32
13. Model Referensi Proses dalam COBIT 5 .....	34
14. Model Kematangan Proses dalam COBIT 4.1.....	35
15. Model Kapabilitas Proses dalam COBIT 5.....	35
16. Kerangka Konseptual.....	41
17. Prosedur Penelitian .....	44
18. Proses MEA01 .....	58

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
2.1. Fokus Definisi Sistem Informasi Manajemen menurut beberapa ahli .....	12
3.1. Responden Penelitian .....	45
3.2. Kisi-kisi kuesioner .....	46
3.3. Kisi-kisi observasi .....	47
3.4. Validasi Penelitian .....	48
3.5. Skala Rating Atribut Proses.....	49
3.6. Penentuan Level Kapabilitas .....	50
4.1. Pemetaan dari <i>Enterprise Goal</i> terpilih ke <i>IT Related Goal</i> .....	53
4.2. Pemetaan <i>IT Related Goal</i> ke Proses TI .....	53
4.3. Proses TI yang teridentifikasi pada BKKB&PP .....	54
4.4. Best Practise Memantau, Evaluasi dan Menilai Kesesuaian Kinerja (MEA01) .....	55
4.5. Work Product Memantau, Evaluasi dan Menilai Kesesuaian Kinerja (MEA01) .....	56
4.6. Perhitungan persentase pencapaian atribut kapabilitas proses .....	57

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Surat Izin Penelitian .....	71
2. Surat Keterangan Penelitian .....	72
3. Proses MEA01.....	73
4. Surat Keterangan Validasi.....	79
5. Kuesioner Penelitian .....	81
6. Lembar Observasi .....	112

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebutuhan akan Teknologi Informasi sangat penting dalam menunjang kinerja sebuah pekerjaan, terutama pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKB & PP) Kabupaten Mukomuko. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko No.10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya, pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan rencana strategis Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko 2011-2015, Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko mempunyai Visi “Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2015” dengan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia.
2. Mewujudkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
3. Mewujudkan optimalisasi pelayanan berkualitas pada bidang Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. Mewujudkan *e-government* dengan meningkatkan efektifitas kinerja dan peningkatkan ketersediaan dukungan teknologi informasi (IT).
5. Meningkatkan peran IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan)
6. Mewujudkan peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar Lembaga/Dinas/Instansi Daerah, Provinsi dan Pusat.

Terkait visi Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko dan memperhatikan misi yang ke empat dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko yakni Mewujudkan *e-government* dengan meningkatkan efektifitas kinerja dan peningkatkan ketersediaan dukungan teknologi informasi (IT), merupakan hal yang menjadi pendukung utama menuju *e-government*. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko telah memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja pelayanannya khususnya pada bidang aset daerah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD).

Pada tahun 2011 Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKB&PP) Kabupaten Mukomuko memanfaatkan aplikasi SIMDA BMD untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah. Output aplikasi ini antara lain :

1. Perencanaan

Daftar Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan, Daftar Rencana Pengadaan Barang Daerah dan Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah.

2. Pengadaan

Daftar Hasil Pengadaan, Daftar Hasil Pemeliharaan Barang, dan Daftar Kontrak Pengadaan.

3. Penghapusan

SK Penghapusan, Lampiran SK Penghapusan dan Daftar Barang yang Dihapuskan

#### 4. Penatausahaan

Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu (sejarah) Barang, Kartu Inventaris ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang Daerah, dan Rekap Hasil Sensus, serta Label Barang.

#### 5. Akuntansi

Daftar Barang yang masuk Neraca (*Intracomptable*), Daftar Barang *Extra Comptable*, Lampiran Neraca, Daftar Penyusutan Aset Tetap, dan Daftar Aset Lainnya (Barang Rusak Berat), serta Rekapitulasi Barang Per SKPD.

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan SIMDA BMD adalah : (1) Menyediakan Data base mengenai kondisi di daerah yang terpadu dari aspek aset daerah yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah. (2) Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan. (3) Efisien dalam melakukan penatausahaan, hanya membutuhkan satu kali input data transaksi sehingga menghemat waktu, tenaga dan biaya.

Walaupun pemanfaatan SIMDA BMD pada BKKB&PP Kabupaten Mukomuko telah diarahkan untuk meningkatkan kinerja di bidang aset daerah, namun belum mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan kinerja pengelolaan SIMDA BMD BKKB&PP Kabupaten Mukomuko. Contoh kasus adalah hasil laporan pemeriksaan audit oleh BPK atau BPKP masih ditemui beberapa temuan pelaksanaan pengelolaan BMD yang tidak optimal. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan BMD di pemerintah daerah? Selama ini, secara teknis pengurus baranglah yang menjadi sasaran segala hal yang berhubungan dengan penatausahaan BMD. Dari sisi pemeriksaan dan pelaporan, pengurus barang lah yang selalu menjadi pihak yang dimintai keterangan dan pertanggungjawaban teknis pengelolaan barang di lingkup SKPD yang dia tangani. Menjadikan mereka seperti tersangka di setiap musim pemeriksaan, baik secara intern dari Inspektorat wilayah maupun BPK perwakilan. Padahal pada PP nomor

27 tahun 2014 sebagai pengganti PP 38 tahun 2008 yang sebelumnya adalah PP nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dan Permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi pedoman pengelolaan BMD, tanggung jawab pengelolaan BMD secara umum, berada pada 4 pihak. Pertama, Kepala Daerah (Gubernur/Bupati), kedua adalah Pengelola Barang (Setda, dan dibantu oleh asisten yang membidangi dan Pembantu Pengelola Barang; Kepala Biro Umum/Kepala DPPKAD), ketiga adalah Pengguna Barang (Kepala SKPD) dan terakhir Pengurus Barang di SKPD yang ditetapkan oleh SK Kepala Daerah setiap tahun.

Dari sisi teknis pelaksana pengelolaan BMD pada BKKB & PP Kabupaten Mukomuko terlihat kelemahan pada kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu hanya ada operator pengurus barang saja. Kasus lainnya adalah barang bergerak (mobil/motor) yang seharusnya menjadi fasilitas untuk jabatan tertentu namun fenomena yang terjadi di lapangan fasilitas mengikuti NIP sehingga pejabat yang sudah pindah ke tempat tugas lain masih membawa mobil/motor yang secara administrasi tercatat sebagai aset pada instansi tempat asal pejabat tersebut bertugas. Tentunya hal ini mempengaruhi kesemrawutan administrasi pada buku inventaris. Dari sisi layanan sistem masih bersifat desktop. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan diselenggarakannya SIMDA secara umum, yaitu untuk efisiensi dan efektifitas kinerja guna menghasilkan informasi yang berkualitas. Belum ada kebijakan dan peraturan khusus untuk Pelaksanaan SIMDA BMD sehingga pengelolaan SIMDA BMD hanya bersifat spontanitas dari pengelola SIMDA BMD.

Hal tersebut diatas dikuatkan dengan data tentang proses monitoring SIMDA BMD yang ada pada BKKB&PP Kabupaten Mukomuko melalui koordinasi dengan pengurus barang yaitu Elva Putriani. Menurut Elva Putriani BKKB&PP Kabupaten Mukomuko sudah 4 (Empat) tahun menggunakan SIMDA BMD, terhitung dari tahun 2011 sampai dengan sekarang. Akan tetapi setiap tahun pemeriksaan dilakukan oleh BPKP

maupun BPK Pusat selalu terjadi keterlambatan pelaporan dan adanya beberapa temuan BPK yang membuat pengurus barang selalu menjadi tersangka. Pihak manajemen puncak selalu memberatkan permasalahan pada pengurus barang, dan hal ini terjadi setiap tahun pemeriksaan. Elva Putriani juga menyatakan bahwa hal ini terjadi akibat tidak adanya pengawasan dan evaluasi serta penilaian terhadap kinerja SIMDA BMD selama ini oleh pihak internal secara berkala, hanya berupa perintah lisan saja dari kepala Badan pada saat pemeriksaan Inspektorat dan BPKP untuk melakukan pengawasan dan evaluasi serta penilaian terhadap kinerja SIMDA BMD. Berikutnya Kepala BKKB&PP dan Kasubbag Umum BKKB&PP menyatakan bahwa selama ini pada bidang aset sering terjadi keterlambatan waktu untuk pelaporan aset yang berdampak pula pada hasil laporan keuangan, dimana sering terjadi kerancuan total harga data aset tidak sama dengan total harga pengadaan yang ada pada laporan keuangan. Kepala BKKB&PP juga menyatakan bahwa belum adanya regulasi atau kebijakan tentang SIMDA baik berupa Perda ataupun kebijakan Bupati untuk Kabupaten Mukomuko juga menjadi kendala bagi BKKB&PP dalam melakukan proses pengawasan dan evaluasi serta penilaian terhadap kinerja SIMDA BMD. Sekretaris BKKB&PP juga menambahkan bahwa untuk mempertahankan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) bagi Kabupaten Mukomuko, Bupati sudah menyarankan kepada seluruh SKPD agar lebih memperhatikan permasalahan aset daerah, mulai dari pengolahan data, pengawasan, laporan dan semua yang berkaitan dengan SIMDA BMD.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang

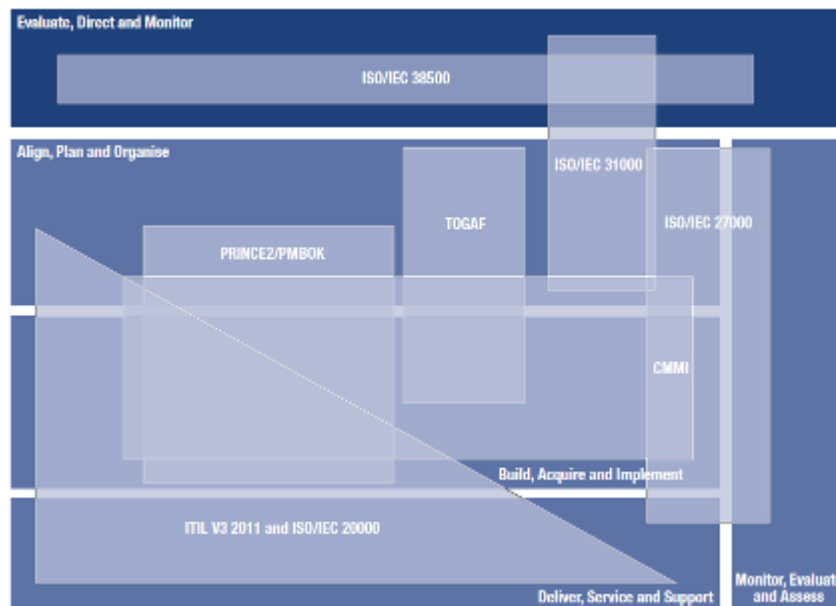
diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan Monitoring untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa diperlukan evaluasi terhadap proses pengawasan kinerja SIMDA BMD yang berkaitan erat dengan pengawasan dan evaluasi serta penilaian terhadap kinerja SIMDA BMD yang baik pada BKKB & PP Kabupaten Mukomuko. Ada berbagai macam kerangka kerja tata kelola TI yang tersedia diantaranya adalah ISO 17799 merupakan suatu struktur dan rekomendasi pedoman yang diakui secara internasional untuk keamanan informasi, dan lebih banyak digunakan oleh perusahaan dalam proses evaluasi, implementasi, pemeliharaan dan pengaturan keamanan informasi yang singkat. ISO/IEC 2700 series yaitu *framework* yang secara khusus digunakan untuk sistem tata kelola keamanan informasi, dan sering digunakan sebagai dokumen panduan sertifikasi sistem tata kelola. *Information Technology Infrastructure Library (ITIL)* yaitu *best practice* untuk mengelola layanan TI, pengembangan dan operasi TI. ITIL lebih fokus pada penyelarasan layanan TI tetapi tidak memperhatikan penyelarasan strategi TI. *The Open Group Architecture Framework (TOGAF)* yaitu suatu kerangka kerja arsitektur yang memberikan pendekatan komprehensif untuk desain, perencanaan, pelaksanaan, dan tata kelola arsitektur informasi. TOGAF secara khusus digunakan untuk pengembangan *Enterprise Architecture (EA)* dan banyak digunakan pada perencanaan strategis sistem informasi. *Australian Standart 8015* merupakan *framework* tata kelola TI yang baik akan tetapi standar ini sangat singkat dan sempit, hanya digunakan sebagai control model. Selain itu ada juga COSO (*Comitte Of Sponsoring Organisation of the treadway Comission*) yang lebih berfokus pada kontrol internal terutama masalah keuangan. COBIT (*Control Objective for Information and related Technology*) yaitu *best practice* untuk tata kelola TI yang dapat membantu

manajemen dan pengguna untuk menjembatani pemisah (*gap*) antara risiko bisnis, kebutuhan pengendalian, evaluasi, dan permasalahan-permasalahan teknis.

Dalam penelitian ini digunakan *framework* COBIT 5 sebagai kerangka kerja dalam mengevaluasi proses pengawasan kinerja tata kelola SIMDA BMD pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko. Dalam COBIT 5 proses pengawasan kinerja TI terletak pada domain MEA yaitu proses domain *Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance* (MEA01). Pemilihan ini dikarenakan karakteristik COBIT 5, adanya pemisahan antara tatanan *governance* sebagai pengambil kebijakan dan *management* sebagai pelaksana, sesuai dengan kondisi Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko sebagai pelaksana layanan teknis atas kebijakan yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Mukomuko. Adapun alasan dipilihnya COBIT 5 adalah :

1. COBIT 5 menyediakan arsitektur yang sederhana untuk menyusun bahan panduan dan menghasilkan produk yang konsisten.
2. COBIT 5 memberikan sebuah arahan yang lengkap mulai dari sistem mutu, perencanaan, manajemen proyek, keamanan, pengembangan dan pengelolaan layanan.
3. COBIT 5 menyediakan kerangka kerja yang lengkap (kerangka komprehensif) yang membantu perusahaan/instansi pemerintah untuk mencapai target mereka dan memberikan nilai melalui tata kelola dan manajemen perusahaan/instansi pemerintah yang baik dibidang TI, menyediakan dasar yang kuat untuk pengaturan keamanan informasi.



**Gambar 1.1. Komparasi COBIT 5 dengan Framework yang lain**  
Sumber : ITGI (2012a)

Dari Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa Framework COBIT 5 telah mengakomodir keseluruhan area tata kelola dan manajemen TI, sedangkan framework yang lain hanya berfokus pada area tertentu saja. Dengan demikian COBIT 5 dapat dijadikan sebagai framework tunggal untuk mengelola TI organisasi mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang terjadi, yaitu :

1. Proses pengawasan, evaluasi dan penilaian terhadap kinerja SIMDA BMD dilakukan dalam bentuk perintah lisan dari Kepala BKKB&PP disaat pemeriksaan tahunan saja, dan tidak dilakukan secara berkala selama ini oleh pihak internal BKKB&PP, sehingga sering terjadi keterlambatan waktu untuk pelaporan aset yang berdampak pula pada hasil laporan keuangan, dimana sering terjadi kerancuan total harga data

aset tidak sama dengan total harga pengadaan yang ada pada laporan keuangan.

2. Belum adanya regulasi atau kebijakan untuk mendukung proses pengawasan, evaluasi dan penilaian terhadap kinerja SIMDA baik berupa Perda ataupun kebijakan Bupati untuk Kabupaten Mukomuko.

### **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini akan lebih terarah dan tujuannya akan lebih fokus dengan membatasi penelitian pada hal-hal sebagai berikut :

1. Penelitian akan dilakukan pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko.
2. Pembahasan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 dengan memfokuskan pembahasan pada domain *Monitor, Evaluate and Access (MEA)* yaitu proses MEA01.

### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kapabilitas proses *Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance (MEA01)* pada SIMDA BMD Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko.
2. Bagaimana rekomendasi perbaikan pada proses pengawasan kinerja SIMDA BMD di Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko.

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengungkap tingkat kapabilitas proses domain terpilih dalam evaluasi SIMDA BMD Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko.
2. Memberikan rekomendasi bagaimana menghasilkan tindakan perbaikan pada proses pengawasan kinerja SIMDA BMD di Badan Koordinasi

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi tiga aspek, yaitu :

1. Manfaat bagi Program Magister CIO, yaitu sebagai bahan bacaan dan sumbangan praktis yang memberikan gambaran tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD).
2. Manfaat bagi peneliti lain, yaitu sebagai referensi dalam penggunaan *framework* COBIT 5 di instansinya.
3. Manfaat bagi instansi, yaitu sebagai rekomendasi tindakan perbaikan proses pengawasan kinerja SIMDA BMD di Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko.

## BAB V

### KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil evaluasi terhadap Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) BKKB&PP Kabupaten Mukomuko dapat disimpulkan bahwa tingkat kapabilitas *Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance* (MEA01) dapat diketahui bahwa BKKB&PP Kabupaten Mukomuko dalam melaksanakan proses ini sudah cukup baik. Ini terbukti dengan tercapainya level 1 *performed process* pada tahap *largely achieved* (66,66%). Sedangkan pada level 2, level 3, level 4, dan level 5 masih belum tercapai, hal ini disebabkan belum optimalnya praktek dasar yang dilaksanakan pada proses MEA01 dan belum adanya pendokumentasian tentang proses MEA01 yang dilakukan, dan kurang terukurnya hasil kerja yang dicapai yaitu *work product* (0%) berada pada level 0 *not achieved*.

Upaya perbaikan yang harus dilakukan adalah peningkatan kapabilitas proses *Monitor, evaluate and assess performance and conformance* (MEA01) dari level 1 menjadi level 2, proses *Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance* (MEA01) atribut *performance process* ditargetkan menjadi *Full Achieved* sedangkan saat ini masih bernilai *Largelly Achieved*. Atribut *performance management* ditargetkan menjadi *Largely Achieved* atau *Fully Achieved* sedangkan saat ini masih *Partially Achieved* dan atribut *work product management* ditargetkan *Fully Achieved* sedangkan saat ini masih *Not Achieved*.

## B. Implikasi

BKKB&PP Kabupaten Mukomuko harus melakukan rekonsiliasi secara berkala dengan DPPKAD (Dinas Pengelolaan Pendapatan Kekayaan Aset Daerah) Kabupaten Mukomuko, agar pengawasan SIMDA BMD berjalan baik. Perlu adanya sebuah kebijakan atau regulasi berupa Perda tentang SIMDA yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko agar proses pemantauan, evaluasi dan menilai kesesuaian kinerja SIMDA BMD bisa berjalan dengan baik, sehingga salah satu syarat untuk mempertahankan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK bisa tercapai.

## C. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk mewujudkan rekomendasi perbaikan pada pengawasan SIMDA BMD BKKB&PP Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya kerjasama yang baik antara BKKB&PP dengan DPPKAD berupa rekonsiliasi data SIMDA BMD secara berkala, agar apabila ada ketidakcocokan data, tindakan korektif bisa dilakukan sedini mungkin untuk mengatasi ketidakcocokan data antara BKKB&PP dan DPPKAD.
2. BKKB&PP Kabupaten Mukomuko perlu membuat suatu perencanaan monitoring SIMDA BMD berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3. Perlunya penetapan tujuan monitoring, target monitoring SIMDA BMD BKKB&PP Kabupaten Mukomuko agar tercapai level 2 sesuai dengan yang diharapkan.
4. Harus dibentuknya satu sub bidang atau tim monitoring dan evaluasi (Monev) yang akan bertugas membuat perencanaan dan memonitor pelaksanaan proses yang berkaitan dengan *Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance*.
5. Melaksanakan semua praktek umum proses MEA01 berdasarkan COBIT 5.

6. Perlu adanya kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh Pemda Kabupaten Mukomuko tentang SIMDA untuk mendukung penerapan standar COBIT 5 pada pengawasan SIMDA BMD BKK&PP Kabupaten Mukomuko, serta adanya kesadaran dari pihak-pihak yang berkepentingan terutama ditingkat top manager.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alvin, Soekamto Wongso dan Harsono Rini. 2013. *Analisis dan Evaluasi Tata Kelola IT Pada PT.FIF dengan Standar Cobit 5*. Jakarta : Laporan Tugas Akhir. Universitas Bina Nusantara.
- Amsyah, Zulkifli. 1997. *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Anwar, M. Khoirul. 2004. *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah, SIMDA*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Anwar, M. Khoirul dan Oetojo S, Asianti. 2004. *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah, SIMDA*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Azhar Susanto. 2002. *Sistem Informasi Manajemen konsep dan pengembangannya*. Bandung : Lingga Jaya.
- Fransiskus Adikara. 2013. *Analisis Kebutuhan Stakeholder Dalam Rangka Mengembangkan Model Tata Kelola Teknologi Informasi Dengan Kerangka Kerja Cobit 5 Pada Perguruan Tinggi*, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Esa Unggul Jl. Arjuna Utara no. 9, Jakarta, 11510.
- Fransiskus Adikara. 2013. *Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi Perguruan Tinggi Berdasarkan Cobit 5 Pada Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Esa Unggul*, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Esa Unggul Jl. Arjuna Utara no. 9, Jakarta, 11510.
- Gordon B. Davis. 1985. *Management Information Systems : Conceptual Foundations, Structure, and Development (2nd ed.)* New York, USA : McGraw-Hill, Inc.
- Indra Dwi Hartanto dan Aries Tjahyanto. 2011. *Analisa Kesenjangan Tata Kelola Teknologi Informasi Untuk Proses Pengelolaan Data Menggunakan Cobit*. Jakarta : BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia).
- Inpres No.3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
- ISACA. 2012. *COBIT 5 A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT*.
- ISACA. 2012. *COBIT 5 Enabling Processes*.